



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2019



PENGADILAN NEGERI KOTABARU KELAS II
JALAN RAYA STAGEN KM. 9,5 DESA STAGEN
KECAMATAN PULAU LAUT UTARA KABUPATEN KOTABARU
PROPINSI KALIMANTAN SELATAN

72114 Telp/ Fax. (0518) 23421-21231

Web : www.pn-kotabaru.go.id | E-Mail : pn.kotabaru@yahoo.co.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 Pengadilan Negeri Kotabaru Kelas II dapat diselesaikan. Ucapan terima kasih juga diucapkan kepada semua pihak, terutama Tim Penyusun sehingga Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini dapat rampung sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggung jawaban kami dalam menjalankan tugas pokok selama tahun 2019. Laporan ini disusun sesuai dengan Outline yang ditentukan Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui surat Nomor 1730/SEK/OT.01.2/12/2019 tanggal 16 Desember 2019 perihal Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019. Laporan ini menggambarkan keadaan dan perkembangan Pengadilan Negeri Kotabaru Kelas II selama Tahun 2019, yaitu keadaan organisasi peradilan secara teknis maupun non teknis, dengan harapan laporan ini dapat dijadikan bahan evaluasi dalam rangka meningkatkan kinerja peradilan yang lebih baik di masa yang akan datang.

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini tentu saja masih jauh dari sempurna, karenanya kritik, saran dan koreksi sangat kami harapkan.

Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Kelas II



Kukuh Kurniawan, SH. MH
NIP. 19780516 200212 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II Keadaan Perkara di Pengadilan Negeri Kotabaru.....	7
A. Keadaan Perkara Pengadilan Negeri Kotabaru	7
B. Penyelesaian Perkara	8
1. Jumlah sisa perkara yang diputus	8
2. Jumlah perkara yang diputus tepat waktu	8
3. Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK	8
4. Jumlah perkara perdata yang berhasil dimediasi	8
5. Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi	8
C. Akreditasi Penjaminan Mutu	8
1. Posbakum	13
2. Sidang Keliling/ Pelayanan Terpadu.....	13
3. Perkara Prodeo (pembebasan biaya perkara)	13
BAB III Sumber Daya Manusia	14
Komposisi SDM berdasarkan kepangkatan/ golongan/ pendidikan.....	14
- Mutasi	16
- Promosi.....	16
- Pensiun	16
- Diklat (SDM Teknis/ Non Teknis yang telah mengikuti Diklat).....	17
BAB IV Pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prasarana dan Teknologi Informasi	18
A. Pengelolaan Keuangan	18
B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana	19
C. Pengelolaan Teknologi Informasi.....	29
- Implementasi e-court di lingkungan Pengadilan Negeri Kotabaru	29
- Implementasi SIPP di lingkungan Pengadilan Negeri Kotabaru	31
BAB V Peningkatan Pelayanan Publik.....	33
- Akrediatasi Penjamin Mutu	33
- Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	35
- Inovasi Pelayanan Publik	46
BAB VI Pengawasan.....	50
A. Internal	50
B. Evaluasi	51
BAB VII Penutup.....	52
A. Kesimpulan	52

B. Saran- saran	52
-----------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. KEBIJAKAN BADAN PERADILAN

Pengadilan Negeri Kotabaru Kelas II terbentuk pada tanggal 27 Agustus 1969 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia daerah hukum meliputi wilayah kabupaten Tingkat II Kotabaru dan sejak tanggal 20 Desember 2011 wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru Kelas II (tidak meliputi wilayah Kabupaten Tanah Bumbu).

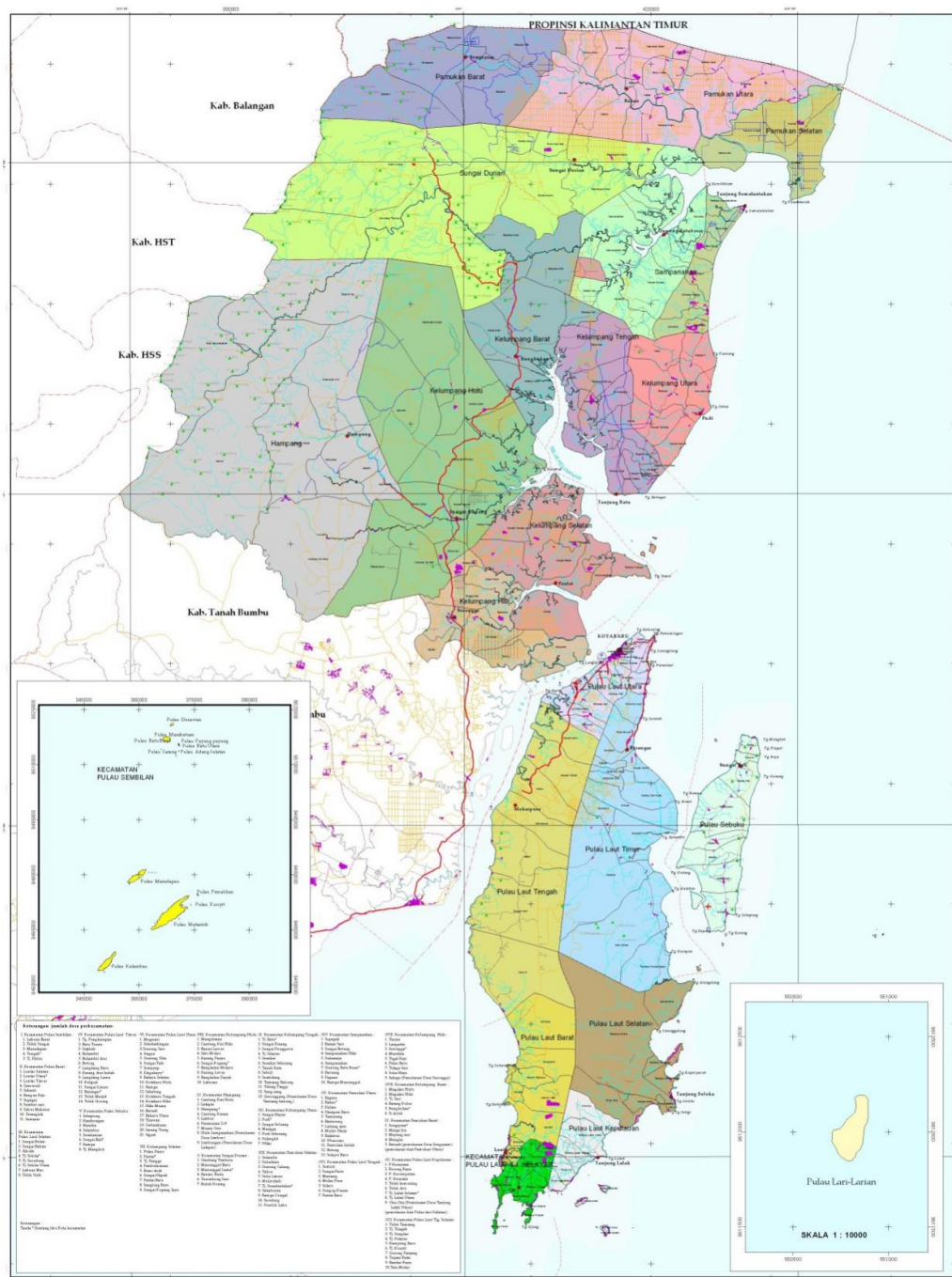
Sebelum terbentuknya Pengadilan Negeri Kotabaru Kelas II, Kabupaten Kotabaru termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin. Akibat pemekaran sejak tanggal 20 Desember 2011 yurisdiksi Pengadilan Negeri Kotabaru Kelas II tidak lagi membawahi Kabupaten Tanah Bumbu dikarenakan sejak tanggal tersebut telah beroperasi Pengadilan Negeri Batulicin.

Sebagai implementasi dari pelaksanaan Undang – undang Dasar 1945 tersebut telah diwujudkan melalui Undang – undang Nomor : 4 tahun 2004 dan diubah dengan Undang-undang Nomor : 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman jo Undang – undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia Undang – undang Nomor : 2 tahun 1986 dan diubah dengan Undang-undang Nomor : 49 tahun 2009 tentang peradilan umum, maka maksud dari undang – undang tersebut, bahwa Mahkamah Agung sebagai lembaga Tertinggi Negara dari semua lingkungan peradilan yang dalam melaksanakan tugas terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh – pengaruh lain serta melakukan pengawasan tertinggi terhadap badan peradilan dibawahnya.

Dengan demikian badan – badan peradilan seperti Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya bertugas untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman secara administratif dan finansial berada dibawah pembinaan Mahkamah Agung.

Pada hakekatnya sebagaimana amanat Undang – undang, bahwa Mahkamah Agung memiliki fungsi peradilan, pengawasan mengatur, memberi nasihat, administratif dan fungsi – fungsi lainnya yang ditentukan undang – undang, yang nantinya dapat terciptanya dan terlaksananya peradilan yang diharapkan masyarakat..

PETA WILAYAH YURIDIKSI PENGADILAN NEGERI KOTABARU KELAS II



B. VISI dan MISI

VISI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

“TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”

MISI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menjaga kemandirian badan peradilan
- Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
- Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
- Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

VISI PENGADILAN NEGERI KOTABARU KELAS II

“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI KOTABARU KELAS II YANG AGUNG”

MISI PENGADILAN NEGERI KOTABARU KELAS II

- Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Kotabaru Kelas II.
- Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan.
- Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Kotabaru Kelas II.
- Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Kotabaru Kelas II .

C. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Rencana strategis Pengadilan Negeri Kotabaru Kelas II disusun mengacu kepada Rencana strategis Mahkamah Agung RI dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019. Adapun Sasaran / Indikator Kinerja Utama dari Rencana Strategik Kinerja Pengadilan Negeri Kotabaru Kelas II tahun 2015 – 2019 antara lain :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Meningkatnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan Teknologi Informasi.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Terwujudnya Manajemen Sistem Informasi yang menunjang sistem Peradilan yang sederhana, transparan, dan akuntabel.
5. Terwujudnya pelaksanaan Pengawasan Kinerja aparat Peradilan yang berintegritas secara optimal baik internal maupun eksternal.
6. Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif.
7. Meningkatnya pengelolaan Manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien.

Sebagai instansi pemerintah menurut Instruksi Presiden RI Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta perannya dalam pengelolaan sumber daya, anggaran maupun kewenangan dalam melayani pencari keadilan.

A. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Pembahasan potensi dan permasalahan di Pengadilan Negeri Kotabaru Kelas II dapat dikelompokkan menjadi analisis lingkungan internal maupun eksternal baik yang menguntungkan maupun yang merugikan bagi Pengadilan Negeri Kotabaru Kelas II. Analisis faktor internal terdiri dari; **Kekuatan (Strength)** dan **Kelemahan (Weakness)**, sedangkan analisis faktor eksternal terdiri dari; **Peluang (Opportunities)** dan **Ancaman (Threats)**.

1. Kekuatan (*Strength*)

- a. Merupakan voorvost (kawal depan) di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru Kelas II.
- b. Merupakan pengambil keputusan dalam memutus suatu perkara baik pidana maupun perdata dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru Kelas II.
- c. Adanya undang-undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri Kabupaten selaku Pengadilan Tingkat Pertama.

2. Kelemahan (*Weakness*)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Kotabaru Kelas II dapat dirinci dalam beberapa aspek:

- a) Aspek Proses Peradilan
 - Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Kelas II sudah dapat diunduh/diakses oleh masyarakat melalui website, namun sistem aplikasinya belum maksimal, karena terkendala sistem program/aplikasi.
 - Belum tersosialisasinya kepada masyarakat / Pencari keadilan mengenai Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Kelas II yang dapat diunduh melalui direktori Putusan dan Website.
 - Sering terkendalanya perkara-perkara yang mana Para pihaknya memerlukan panggilan delegasi, sehingga penyelesaian perkara bisa lebih dari 5 (lima) bulan.
- b) Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja serta kebutuhan yang dikehendaki di Pengadilan Negeri Kotabaru Kelas II
 - Pengadilan Negeri Kotabaru Kelas II masih kekurangan Hakim dan tenaga pegawai (pejabat struktural), sehingga tidak sebanding dengan beban kerja.
- c) Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
 - Sudah ada sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi melalui Program SIPP, namun aplikasinya belum maksimal dan masih dalam proses penyempurnaan.

- d) Aspek Sarana dan Prasarana
 - Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Kotabaru Kelas II dari pusat ada yang belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.

3. Peluang (*Opportunities*)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Kotabaru Kelas II untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

- a) Aspek Proses Peradilan
 - Adanya pemanfaatan teknologi informasi melalui website Pengadilan Negeri Kotabaru Kelas II untuk memberikan kemudahan pelayanan informasi kepada masyarakat (pencari keadilan) tentang alur proses perkara di lingkungan peradilan.
 - Banyaknya Regulasi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung sebagai panduan / acuan dalam bekerja.
- b) Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja.
 - Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Banjarmasin maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia
- c) Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal ke Pengadilan Negeri Kotabaru Kelas II.
- d) Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
 - Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banjarmasin.
- e) Aspek Sarana dan Prasarana
 - Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Kotabaru Kelas II berupa internet, website Pengadilan Negeri Kotabaru Kelas II.

4. Ancaman/Tantangan yang dihadapi (*Threats*)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Kotabaru Kelas II yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

- a) Aspek Proses Peradilan

- Belum adanya koordinasi yang efektif dengan institusi terkait (Stakeholder Eksternal) sehingga sering terjadi diskomunikasi yang sedikit banyaknya berpengaruh terhadap proses peradilan.
- Belum tersedianya suatu alat pengukur kepuasan pengguna jasa peradilan.

b) Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Personil di Pengadilan Negeri Kotabaru Kelas II belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Negeri Kotabaru Kelas II.
- Kurangnya pemahaman dan belum adanya kesamaan persepsi dari para Personil Pengadilan Negeri Kotabaru Kelas II dalam memahami fungsi, tugas dan tanggungjawabnya.

c) Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Pengadilan Negeri Kotabaru Kelas II telah melakukan Pengawasan dan Pembinaan secara berjenjang dan terus menerus.

d) Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- letak Pengadilan Negeri Kotabaru Kelas II yang jauh di daerah, sehingga pengiriman administrasi untuk perkara banding ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin, dan perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung membutuhkan waktu lebih lama.
- Terdapat beberapa persoalan administrasi yang agak sulit untuk dikoordinasikan dengan pihak terkait, yang hal tersebut sering mengganggu ketertiban yang telah ditentukan.

e) Aspek Sarana dan Prasarana

- Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana ada yang belum sesuai dengan kebutuhan, sehingga dalam pemenuhan sarana dan prasarana dituntut untuk melakukan optimalisasi.

BAB II

KEADAAN PENGADILAN NEGERI KOTABARU

A. Keadaan Perkara di Pengadilan Negeri Kotabaru

- Keadaan Perkara Tingkat Pertama

Matrik Keadaan Perkara Tahun 2019

No	Nama	Sisa Tahun 2018	Perkara Masuk 2019	Perkara Yang Diputus 2019	Sisa Perkara 2019	Ket
1	Perdata	13	60	65	8	
2	Pidana Biasa	33	310	296	47	
3	Pidana Anak	0	15	13	0	
4	Pidana Khusus (Tipikor)	0	0	0	0	

Matrik Perkara Tahun 2019

No	Perkara	Perkara Masuk 2019	Perkara Yang Diputus	Sisa Perkara	Keterangan
1	Pidana Biasa	310	296	47	
2	Pidana Anak	15	13	0	2 Diversi
3	Pidana Ringan Tipiring	53	53	0	
4	Pidana Cepat (Lalulintas)	2.818	2.818	0	
5	Praperadilan	2	1	0	1 Dicabut
6	Perdata Gugatan	17	20	7	
7	Perdata Permohonan	38	38	0	
8	Perdata Gugatan Sederhana	5	5	1	

Jumlah Sisa Perkara yang di Putus Tahun 2019

No	Perkara	Sisa Perkara diawal Tahun 2019	Putus Selama 2019
1	Perdata	13	63
2	Pidana Biasa	33	296
3	Pidana Anak	0	13
4	Pidana Khusus Korupsi (Tipikor)	0	0
Total Perkara Sisa Perkara Yang Diputus		33	309

Jumlah Perkara yang di Putus Tepat Waktu Tahun 2019

No	Perkara	Putus Tepat Waktu	Putus Tidak Tepat Waktu
1	Perdata	51	12
2	Pidana Biasa	296	0
3	Pidana Anak	13	0
4	Pidana Khusus Korupsi (Tipikor)	0	0
Total Perkara Yang Diputus		360	12

Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2019

No	Perkara	Putus	Banding	Tidak Banding
1	Perdata	63	11	52
2	Pidana Biasa	296	9	285
3	Pidana Anak	13	0	13
4	Pidana Khusus Korupsi (Tipikor)	0	0	0

Total	372	20	350
-------	-----	----	-----

Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2019

No	Perkara	Banding	Kasasi	Tidak Banding
1	Perdata	11	9	2
2	Pidana Biasa	9	2	285
3	Pidana Anak	0	0	0
4	Pidana Khusus Korupsi (Tipikor)	0	0	0
Total		20	11	287

Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Peninjauan Kembali Tahun 2019

No	Perkara	Kasasi	PK	Tidak PK
1	Perdata	9	1	8
2	Pidana Biasa	2	0	285
3	Pidana Anak	0	0	0
4	Pidana Khusus Korupsi (Tipikor)	0	0	0
Total		11	1	293

Jumlah Perkara Perdata yang Berhasil di Mediasi Tahun 2019

No	Perkara	Masuk	Mediasi	Tidak Mediasi
1	NIHIL			
2				
Total				

B. Penyelesaian Perkara

1. Jumlah sisa perkara yang diputus ditahun 2019 adalah 47 perkara.
2. Jumlah perkara yang diputus tepat waktu ditahun 2019 adalah 26 perkara.
3. Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK ditahun 2019 adalah 285 perkara.
4. Jumlah perkara perdata yang berhasil dimediasi ditahun 2019 tidak ada (nihil).
5. Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi ditahun 2019 adalah 2 perkara.

C. Akreditasi Penjamin Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan)

Pengadilan Negeri Kotabaru Kelas II yang telah meraih Sertifikat Akreditasi A “Excellent” dari Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum pada 22 Juni 2018 di Balikpapan Kalimantan Timur, hasil tersebut bukanlah merupakan hasil akhir dari proses implementasi manajemen mutu tetapi bagi kami adalah merupakan awal dari penerapan sistem manajemen mutu untuk memberikan pelayanan yang berkualitas, bermutu secara sistematis dan terorganisir. Karena secara keseluruhan Sistem Manajemen Mutu terdiri dari pelaksanaan implementasi Sistem Manajemen Mutu dan peningkatan kualitas yang terus menerus. Pengadilan Negeri Kotabaru memiliki komitmen untuk memberikan pelayanan yang bermutu selalu terjaga dan tetap kuat. Perbaikan dan peningkatan ke arah

yang lebih baik akan tetap dilakukan sesuai dengan tuntutan kemajuan teknologi yang semakin canggih dan tuntutan global.



(foto sertifikat akreditasi)



**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
NOMOR: 1523/DJU/SK/OT01.3/7/2018**

TENTANG

**NILAI AKREDITASI PENJAMINAN MUTU BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN NEGERI KOTABARU KELAS II
TAHUN ANGGARAN 2018**

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menetapkan nilai Akreditasi Penjaminan Mutu pada Pengadilan Negeri Kotabaru Kelas II, perlu diadakan rapat penilaian oleh Komite Keputusan Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum;
- b. bahwa hasil rapat Komite Keputusan Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum pada tanggal 22 Juni 2018 sebagaimana daftar nilai terlampir;
- c. bahwa nilai tersebut akan dipantau secara periodik (enam bulan sekali) selama 3 (tiga) tahun untuk melihat kembali apakah nilai akreditasi masih dapat dipertahankan atau tidak.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang - Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/1/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
5. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum nomor 1639/DJU/SK/OT01.1/9/2015 tentang Tim Akreditasi Penjaminan Mutu;
6. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum nomor 2021/DJU/SK/OTO1.3/12/2015 tentang Pembentukan Komite Keputusan Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM TENTANG NILAI AKREDITASI PENJAMINAN MUTU BADAN PERADILAN UMUM PENGADILAN NEGERI KOTABARU KELAS II TAHUN ANGGARAN 2018

- KESATU : Menetapkan nilai Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Kotabaru Kelas II, daftar nilai terlampir;
- KEDUA : Hasil rapat Komite Keputusan Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juli 2018

**DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM,**



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
3. Sekretaris Mahkamah Agung RI;

Lampiran
Surat Keputusan Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum
Nomor: 1523/DJU/SK/OT01.3/7/2018
Tanggal : 23 Juli 2018

**NILAI AKREDITASI PENJAMINAN MUTU
PENGADILAN NEGERI KOTABARU KELAS II**

		NILAI AKHIR
1. Kepemimpinan (<i>Leadership</i>)	200	130
2. Fokus Pelanggan/Pengguna (<i>Customer Focus</i>)	200	135
3. Manajemen Proses (<i>Process Management</i>)	200	132
4. Perencanaan Strategis (<i>Strategic Planning</i>)	100	77
5. Manajemen Sumber Daya (<i>Resource Management</i>)	100	80
6. Sistem Dokumen (<i>Dokumen System</i>)	100	75
7. Hasil Kinerja (<i>Performance Result</i>)	100	78
Jumlah	1000	707
Akreditasi A (Excellent)		

**DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM,**



6. Pos Bantuan Hukum (posbakum)

Pengadilan Negeri Kotabaru Kelas II mendapat alokasi anggaran Pos Bantuan Hukum (posbakum) yang dimana tahun ini tahun 2019 sebesar Rp. 24.000.000,- di mana Pengadilan Negeri Kotabaru bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum Saijaan dengan Realisasi sebesar 100%.

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)
522131	Posbakum	24.000.000	24.000.000	0



(foto penandatanganan perjanjian kerjasama posbakum)

7. Sidang keliling/ pelayanan terpadu

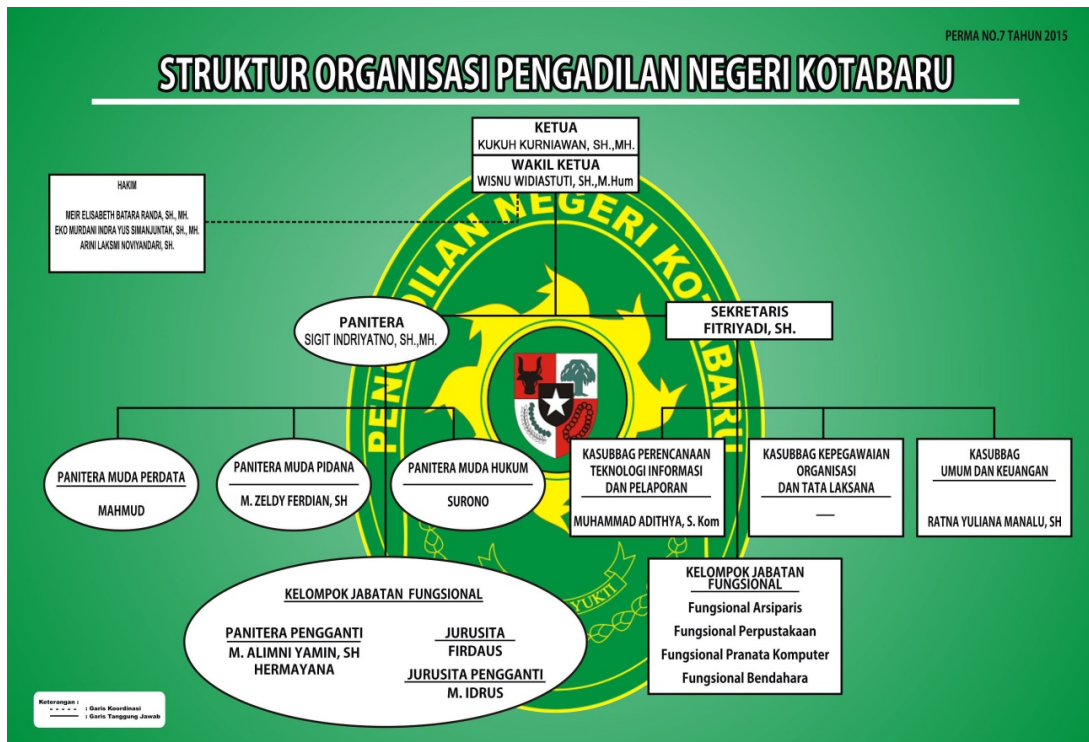
Pengadilan Negeri Kotabaru Kelas II di tahun anggaran 2019 tidak ada alokasi anggaran sidang keliling/ pelayanan terpadu.

8. Perkara prodeo (pembebasan biaya perkara)

Pengadilan Negeri Kotabaru Kelas II di tahun anggaran 2019 tidak ada alokasi anggaran Perkara prodeo (pembebasan biaya perkara).

BAB III

Sumber Daya Manusia



Komposisi SDM berdasarkan kepangkatan/ golongan/ pendidikan

No	Nama dan Nip	Pangkat/Gol	Jabatan	Pendidikan
1	KUKUH KURNIAWAN, S.H., M.H. NIP. 19780516 200212 1 005	Pembina (IV/a)	Ketua	Sarjana S2
2	Dr.WISNU WIDIASTUTI, S.H., M.Hum. NIP. 19751205 200112 2 001	Pembina (IV/a)	Wakil Ketua	Sarjana S3
3	MEIR ELISABETH BATARA RANDA, S.H., M.H. NIP. 19860404 200912 2 002	Penata (III/c)	Hakim	Sarjana S2
4	EKO MURDANI INDRA YUS SIMANJUNTAK, S.H., M.H. NIP. 19851014 200912 1 006	Penata (III/c)	Hakim	Sarjana S2
5	ARINI LAKSMI NOVIYANDARI, S.H. NIP. 19821123 201101 2 007	Penata (III/c)	Hakim	Sarjana S1
6	SIGIT INDRIYATNO, S.H., M.H. NIP. 19740415 199403 1 001	Pembina (IV/a)	Panitera	Sarjana S2
7	FITRIYADI, S.H. NIP. 19691106 199005 1 001	Penata Tk.1 (III/d)	Sekretaris	Sarjana S1
8	MUHAMMAD ZELDY FERDIAN, S.H. NIP. 19810118 200904 1 003	Penata (III/c)	Panmud Pidana	Sarjana S1
9	M A H M U D NIP. 19670603 199203 1 004	Penata (III/c)	Panmud Perdata	S L T A
10	S U R O N O NIP. 19690407 199203 1 002	Penata (III/c)	Panmud Hukum	S L T A
11	RATNA YULIANA MANALU, S.H. NIP. 19870721 201212 2 003	Penata Muda Tk. I (III/b)	Kasubbag Umum dan Keuangan	Sarjana S1

12	MUHAMMAD ADITHYA, S. Kom., S.H. NIP. 19870927 200912 1 004	Penata Muda Tk. I (III/B)	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	Sarjana S1
13	FITRIYADI, S. Kom. NIP. 19880518 201101 1 003	Penata Muda (III/a)	Plt. Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Sarjana S1
14	MUHAMMAD ALIMNI YAMIN, S.H. NIP. 19621203 199003 1 005	Penata (III/c)	Panitera Pengganti	Sarjana S1
15	HERMAYANA NIP. 19671231 198903 2 011	Penata (III/c)	Panitera Pengganti	S L T A
16	F I R D A U S NIP. 19750907 200212 1 001	Penata Muda (III/a)	Jurusita	S L T A
17	MUHAMMAD IDRUS NIP. 19700717 199303 1 003	Penata Muda (III/a)	Jurusita Pengganti	S L T A
18	TULUS PAWITNO NIP. 19720828 199103 1 001	Pengatur Tk. I (II/d)	Staf Bagian Kepegawaian, Ortala	S L T A
19	YUNITA SITINJAK , S. Kom NIP. 19870603 201503 2 003	Penata Muda Tk. I (III/b)	Staf Bag. Umum dan Keuangan	Sarjana S1
20	SUPIANI NIP. 19630102 201408 1 001	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	Staf Bag. Umum dan Keuangan	S L T A
21	SOFYAN DENY SAPUTRO, S.H. NIP. 19911221 201712 1 004	Penata Muda (III/a)	Calon Hakim	Sarjana S1
22	MASMUR KABAN, S.H. NIP. 19930826 201712 003	Penata Muda (III/a)	Calon Hakim	Sarjana S1
23	NOORILA ULFA NAFISAH, S.H. NIP. 19950421 201712 2 003	Penata Muda (III/a)	Calon Hakim	Sarjana S1
24	YUNUS TAHAN DILAUT SIPAHUTAR, S.H. NIP. 19900531 201712 1 004	Penata Muda (III/a)	Calon Hakim	Sarjana S1
25	SENO PRIBANDONO, S.E. NIP. 19840830 201903 1 002	Penata Muda (III/a)	Staf Kepaniteraan Perdata	Sarjana S1
26	DWI KARTIKA PUSPA SARI	-	Honorer/Pramubakti	SMU
27	NOR JAHRIAH	-	Honorer/Pramubakti	SMK
28	AFRIANSYAH	-	Honorer/Pramubakti	MAN
29	HADI UTOMO, S.E.	-	Honorer/Pramubakti	S 1
30	MAULIDA ANJANI	-	Honorer/Pramubakti	SMK
31	SYAHRIL MAULANA	-	Honorer/Pramubakti	SMK
32	RINA MARIYANA, S.Pd.	-	Honorer/Pramubakti	S 1
33	DEWI SARTIKA, S.H.	-	Honorer/Pramubakti	S 1
34	RENDRA HERDIANANDA, S.E.	-	Honorer/Pramubakti	S 1
35	SUPRIYANTO	-	Honorer/Satpam	SMA
36	AKHMAD FITRIADI	-	Honorer/Satpam	MADU
37	WAWAN KISTANTORO	-	Honorer/Sopir	SMP
38	ADI SUKMAJAYA	-	Honorer/Sopir	MAN

f) Mutasi di Pengadilan Negeri Kotabaru

Di Tahun 2019 Pengadilan Negeri Kotabaru terdapat beberapa mutasi Keluar dan mutasi masuk, kami lampirkan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel Mutasi Masuk
Pengadilan Negeri Kotabaru**

No.	NAMA	Masuk	
		Jabatan	Dari Pengadilan
1.	KUKUH KURNIAWAN, S.H., M.H.	Ketua	PN Semarapura
2.	SIGIT INDRIYATNO, S.H., M.H.	Panitera	PN Bantul
Total Mutasi Masuk			2 Orang

**Tabel Mutasi Keluar
Pengadilan Negeri Kotabaru**

No.	NAMA	Masuk	
		Jabatan	Ke Pengadilan
1.	DARWANTO, S.H., M.H.	Ketua	PN Probolinggo
2.	LINDA, S.H.	Panitera	PN Palangkaraya
3.	DAMAYKA, S.H., M.H.	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	PN Batulicin
4.	RORY NOPRIKA, S.H.	Staf	PN Pelaihari
Total Mutasi Keluar			4 Orang

g) Promosi di Pengadilan Negeri Kotabaru

Selama Tahun 2019 ada 1(satu) staf pelaksana di Pengadilan Negeri Kotabaru yang di promosikan menjadi Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana an. Fitriyadi, S.Kom namun masih menunggu Surat Keputusan Resmi dari Sekretaris Mahkamah Agung RI.

h) Pensiun di Pengadilan Negeri Kotabaru

Untuk Tahun 2019 tidak ada Pejabat Struktural, Fungsional dan Staf yang Pensiun.

i) Diklat (SDM Teknis/ Non Teknis yang telah mengikuti Diklat)

Di Tahun 2019 ada beberapa orang yang mengikuti Diklat yang di adakan oleh Badan Diklat Litbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung dengan rincian tabel sebagai berikut:

Tabel yang Mengikuti Diklat Teknis

No.	Nama	Jabatan	Mengikuti Diklat	Waktu
1	FITRIYADI, SH	Sekretaris	Kepemimpinan Tk. IV	3 Februari –25 Mei 2019 (893 jam)
2	Eko M.I.Y Simanjuntak, SH. MH	Hakim	Hakim Lingkungan	18 Nopember – 1 Desember 2019 (14 hari)

BAB IV

Pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prasarana, dan Teknologi Informasi

A. Pengelolaan Keuangan

Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas Pengelola Keuangan negara khususnya di Pengadilan Negeri Kotabaru Kelas II adalah penyampaian laporan pertanggung jawaban keuangan yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan sasaran dengan mengikuti standar-standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disampaikan berupa laporan keuangan tentang realisasi anggaran.

Pada prinsipnya, pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh Mahkamah Agung mengacu pada asas-asas umum pengelolaan keuangan negara sebagaimana dijabarkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang keuangan negara Kedalam asas-asas umum seperti asas tahunan, universalitas, asas kesatuan dan asas spesialisitas maupun asas-asas baru sebagai perceminan best practices (penerapan landasan landasan yang baik) dalam pengelolaan keuangan negara seperti akuntabilitas berorientasi hasil, profesionalitas, proporsionalitas, keterburukan dalam pengelolaan keuangan negara pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksaan yang bebas dan mandiri.

Untuk Tahun Anggaran 2019 Pengadilan Negeri Kotabaru kelas II mempunyai 2 (dua) DIPA Anggaran yaitu 099219 (01) sebesar Rp. 3.767.567.000,- (tiga milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dan 099256 (03) sebesar Rp. 201.508.000,- (dua ratus satu juta lima ratus delapan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

N O	JENIS BELANJA	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA PAGU (Rp)
099219 (DIPA 01)					
1.	Gaji Dan Tunjangan	2.653.881.000	2.651.450.067	99.91	2.430.933
2.	Operasional dan pemeliharaan perkantoran belanja barang	1.081.536.000	1.028.533.317	95.10	53.002.683
3.	Pengadaan sarana dan prasarana	82.000.000	81.572.000	99.48	428.000
099256 (DIPA 03)					
1.	Dukungan Manajemen Peradilan	201.508.000	198.991.500	98.75	2.516.500

B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Pengadilan Negeri Kotabaru mempunyai Kantor Lama yang terletak di Jalan Jamrud I Desa Dirgahayu Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, kantor lama dengan luas bangunan 758 M2 dan luas halaman 400 M2 dikarenakan kondisi yang sering terkena banjir maka sejak 02 Mei 2019 menempati Kantor baru Pengadilan Negeri Kotabaru yang beralamat di Jalan Raya Stagen Km. 9,5 Desa Stagen Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru. Saat ini telah mempunyai Gedung dan prototype sesuai dengan standar Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sarana dan prasarana gedung yang mendukung pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Kotabaru saat ini cukup memadai, tidak hanya untuk pegawai Pengadilan Negeri Kotabaru tetapi juga untuk masyarakat pencari keadilan dan juga penyandang disabilitas. Tersedianya sarana dan prasarana tersebut diharapkan mampu memberikan kenyamanan kepada masyarakat pencari keadilan wujud pelayanan prima Pengadilan Negeri Kotabaru. Gedung Pengadilan Negeri Kotabaru memiliki luas tanah seluruhnya 6.403 M2 yang merupakan tanah Milik Pemerintah Indonesia cq. Mahkamah Agung dengan bangunan 2 Lantai seluas 1.600 M2. Gedung Kantor Pengadilan Negeri Kotabaru yang terdiri dari 2 lantai sudah sesuai gedung prototype dan sudah ditempati dan digunakan. Berikut penataan ruangan-ruangan kantor yang baru:

Lantai 1 :

1. Lobby Kantor Pengadilan Negeri Kotabaru terdapat Meja PTSP (yang terdiri dari Meja help desk, meja kasir, meja Hukum / informasi, meja Pidana, meja perdata, meja umum dan keuangan, meja inzage, meja humas), 3 kursi pengunjung, korsi roda khusus difabel, banner informasi pengadilan, 1 buah TV informasi, 1 buah TV antrian, 1 buah meja Pojok internet, 1 buah fotocopy, 3 buah AC, 1 buah lemari pendingin dan loker.
2. Ruang Tamu terbuka dilengkapi dengan 2 buah kursi tamu, 1 buah TV, 1 buah tempat koran, dan struktur organisasi.
3. Ruang sidang utama yakni ruang sidang Cakra dilengkapi dengan 1 perangkat meja sidang, 4 buah AC, 6 buah kursi pengunjung, sound sistem.
4. Ruang sidang I yakni ruang sidang Candra dilengkapi dengan 1 perangkat meja sidang, 4 buah AC, 6 buah kursi pengunjung, sound sistem.
5. Ruang sidang Khusus Anak (Ramah Anak) yaitu ruang sidang Tirta 1 perangkat meja sidang, 2 buah kursi pengunjung dan 1 buah AC.
6. Ruang Tahanan Dewasa dilengkapi dengan 1 buah toilet dan 2 buah AC.
7. Ruang Tahanan Wanita dilengkapi 1 buah toilet dan 1 buah AC.

8. Ruang Tunggu Anak ditahan dilengkapi dengan 1 buah AC.
9. Ruang Tunggu anak tidak ditahan dilengkapi dengan 1 buah AC, 1 buah meja dan beberapa alat permainan serta buku bacaan.
10. Ruang Perpustakaan dilengkapi dengan 1 buah AC, 1 buah meja kerja dan 1 buah lemari kayu.
11. Ruang ibu menyusui dan ruang kesehatan anak dilengkapi dengan 1 buah tempat tidur bayi, satu buah tempat tidur, 1 buah sofa 1 buah kotak p3k / first aid box dan 1 buah AC.
12. Ruang Mediasi, Bapas, Peksos, Diversi dilengkapi dengan, Meja Bundar, Kursi, 1 buah pesawat telepon pabx dan 1 buah AC.
13. Ruang Pos Bankum dilengkapi dengan 1 buah kursi tamu, 1 buah meja kerja, 1 buah lemari, 1 buah pesawat telepon pabx dan 1 buah AC.
14. Ruang Tunggu Jaksa dilengkapi dengan 1 buah kursi tamu, 1 buah pesawat telepon pabx dan 1 buah AC.
15. Ruang Mussola dilengkapi dengan 1 buah AC, 1 Buah lemari Kayu, Karpas, 1 buah mimbar dan alat sholat.
16. Ruang tunggu pengunjung belakang dilengkapi dengan 4 buah kursi panjang pengunjung, 1 buah meja jaga.
17. Terdapat 3 toilet umum dan 1 toilet difabel.

Lantai 2 :

1. Ruang Kerja Ketua dilengkapi dengan 1 buah meja kerja, 1 buah kursi tamu, 2 buah AC, 2 buah TV pemantau cctv, 1 buah lemari toga, 1 buah pesawat telepon pabx, dan toilet.
2. Ruang Kerja Wakil Ketua dilengkapi dengan 1 buah meja kerja, 1 buah kursi tamu, 1 buah AC, 1 buah pesawat telepon pabx dan toilet.
3. Ruang Kerja Hakim dilengkapi dengan 6 buah meja kerja, 1 satu buah Lemari Toga, 4 buah filling cabinet, 1 buah kursi tamu, 4 Buah AC, ruang ganti, 1 buah pesawat telepon pabx dan toilet.
4. Ruang Kerja Panitera dilengkapi dengan 1 buah meja kerja, 1 buah kursi tamu, 1 buah filling cabinet, 1 buah AC, 1 buah pesawat telepon pabx dan toilet.
5. Ruang Kerja Sekretaris dilengkapi dengan 1 buah kursi tamu, 1 buah meja kerja, 2 buah lemari besi, 1 buah pesawat telepon pabx, 1 buah AC dan toilet.
6. Ruang Rapat dilengkapi kursi serta 1 buah meja rapat, 17 buah kursi rapat 1 buah pesawat telepon pabx, 2 buah lemari besi dan 1 buah AC.

7. Ruang Kerja Kepaniteraan Pidana dilengkapi 5 buah meja kerja, 3 buah filling cabinet, 5 buah lemari besi, 1 buah pesawat telepon pabx , 2 buah lemari Kayu dan 1 buah AC.
8. Ruang Kerja Kepaniteraan Perdata dilengkapi 5 buah meja kerja, 1 buah lemari kayu, 3 buah lemari besi, 1 buah pesawat telepon pabx dan 1 buah AC.
9. Ruang Kerja Kepaniteraan Hukum dilengkapi 4 buah meja kerja, 2 buah lemari besi, 3 buah filing cabinet, 1 buah pesawat telepon pabx dan 1 buah AC.
10. Ruang Kerja Sub Umum dan Keuangan dilengkapi 7 buah meja kerja, 7 buah lemari besi, 3 buah filling cabinet, 1 buah tv, 1 buah kursi tamu, 3 buah AC, 1 buah pesawat telepon pabx, 1 buah brangkas dan Ruang Bendahara.
11. Ruang Kerja Sub Kepegawaian Organisasi dan tata Laksana dilengkapi 5 buah meja kerja 3 buah lemari besi, 1 buah lemari kayu, 1 buah pesawat telepon pabx dan 2 buah AC.
12. Ruang Kerja Sub Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan dilengkapi 5 meja kerja, 2 buah lemari besi 2 buah AC, 1 buah pesawat pabx telepon dan Ruang Server serta CCTV.
13. Ruang Arsip dilengkapi dengan 2 buah meja, 12 rak arsip, 1 buah AC dan CCTV.
14. Ruang Pantri/ Dapur.
15. Ruang ATK dilengkapi dengan 4 buah lemari besi, 1 buah filling cabinet, 2 buah etalase dan 1 buah Kipas Angin.
16. Toilet Karyawan yang terpisah antara laki-laki dan perempuan.

Halaman :

1. Pos Satpam I yang dilengkapi dengan 1 buah AC, meja jaga dan kamar mandi.
2. Pos Satpam II yang dilengkapi dengan 1 buah AC dan meja jaga.
3. Portal.
4. Drop zone.
5. Taman Depan, taman samping kanan dan kiri.
6. Titik kumpul.
7. Titik evakuasi.
8. Tempat parkir mobil Khusus Karyawan.
9. Tempat parkir motor Khusus Karyawan.
10. Tempat parkir mobil Tamu.
11. Tempat parkir motor Tamu.
12. Sumur bor.

13. Tempat penampungan air.
14. Gudang.
15. Ruang genset dilengkapi dengan genset dengan Daya 40 KVA (Engine cummins silent type, Engine Model 4BT3.9-G2).

Berikut adalah Matrik daftar sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Kotabaru :

Matrik Kantor Pengadilan Negeri Kotabaru

No	Uraian	Jumlah	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Kantor Lama	1	√			
2	Kantor Baru	1	√			

Matrik Kendaraan Dinas Pengadilan Negeri Kotabaru

No	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
I	Kendaraan Roda 4					
1	Kijang Inova	2012	√			
2	Toyota New Avanza Luxury	2015	√			
II	Kendaraan Roda 2					
1	Honda Mega Pro GLP III	2008	√			
2	Honda MCB/ Win	2012	√			
3	Suzuki Sky Wave UW125SC	2009	√			
4	Suzuki Sky Wave UW125SC	2009	√			
5	Honda Mega Pro GLP III	2008	√			
6	Honda GL MAX 150	2005	√			
7	Honda CG 110	1981	√			
8	Suzuki Spin UY125 SC	2007	√			

Matrik Rumah Dinas Pengadilan Negeri Kotabaru

No	Uraian	Jumlah	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Rumah Dinas Ketua	1	√			
2	Rumah Dinas Wakil Ketua	1	√			
3	Rumah Dinas Hakim	9	8		1	
4	Rumah Dinas Panitera	1	√			

Matrik Sarana dan Prasarana Pengadilan Negeri Kotabaru

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Ruang Ketua	1	
2	Ruang Wakil Ketua	1	
3	Ruang Hakim	1	
4	Ruang Panitera	1	
5	Ruang Sekretaris	1	
6	Ruang Rapat	1	
7	Ruang Kepaniteraan Pidana	1	
8	Ruang Kepaniteraan Hukum	1	
9	Ruang Kepaniteraan Perdata	1	
10	Ruang Arsip	1	
11	Ruang Sub Bagian Perencanaan TI dan Pelaporan	1	
12	Ruang Kepegawaian dan Ortala	1	
13	Ruang Umum dan Keuangan	1	
14	Ruang Server	1	
15	Ruang PTSP	1	
16	Ruang Tamu Terbuka	1	
17	Ruang Sidang Anak	1	
18	Ruang anak ditahan	1	
19	Ruang Tunggu Anak	1	
20	Ruang Laktasi	1	
21	Ruang Perpustakaan	1	
22	Ruang Bapas	1	
23	Ruang Mediasi	1	
24	Ruang Sidang Utama/ Cakra	1	
25	Ruang Sidang Candra	1	
26	Ruang Sidang Tirta	1	
27	Ruang Tahanan Pria	1	
28	Ruang Tahanan Wanita	1	
29	Ruang Mushola	1	
30	Ruang Jaksa	1	
31	Ruang Posbakum	1	
32	Toilet Pengunjung	3	
33	Toilet disabilitas	1	
34	Toilet Karyawan	2	
35	Toilet Ketua	1	
36	Toilet Wakil Ketua	1	
37	Toilet Panitera	1	
38	Toilet Seketaris	1	
39	Toilet Tahanan Wanita	1	
40	Toilet tahanan Pria	1	



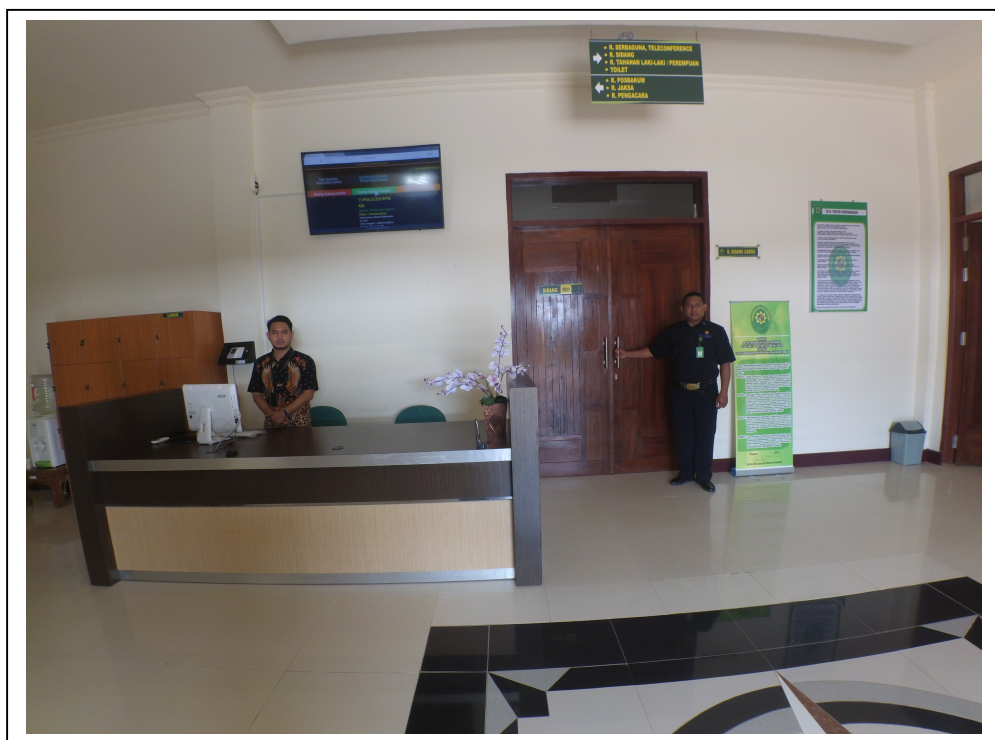
(foto pintu masuk pengadilan negeri kotabaru)



(foto gedung kantor pengadilan negeri kotabaru)



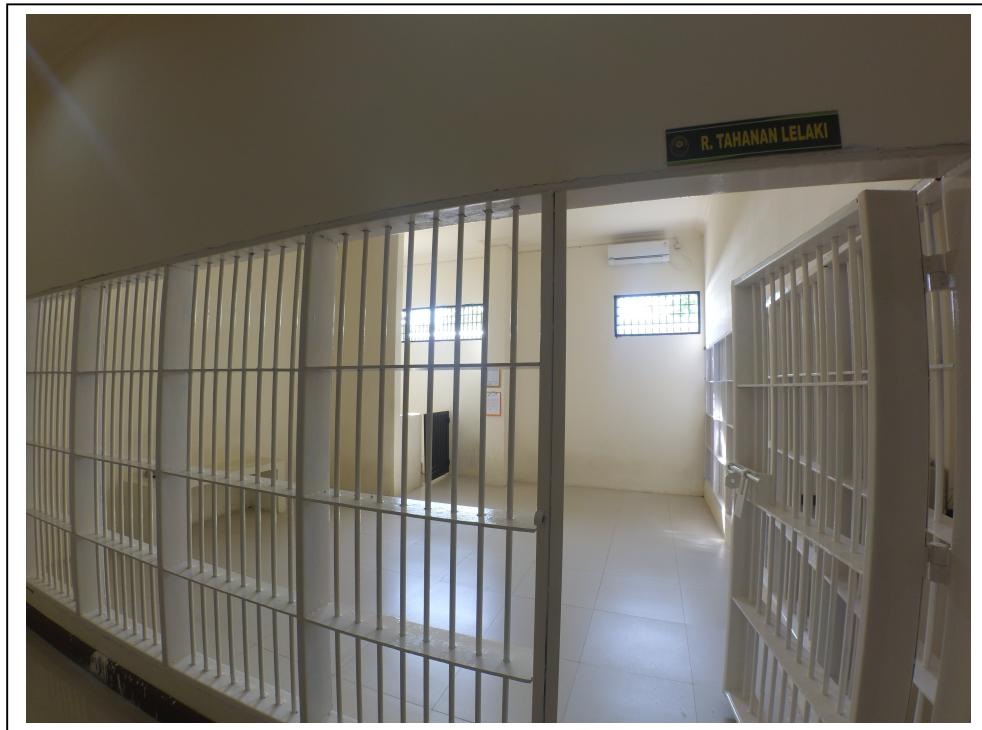
(foto kantor lama pengadilan negeri kotabaru)



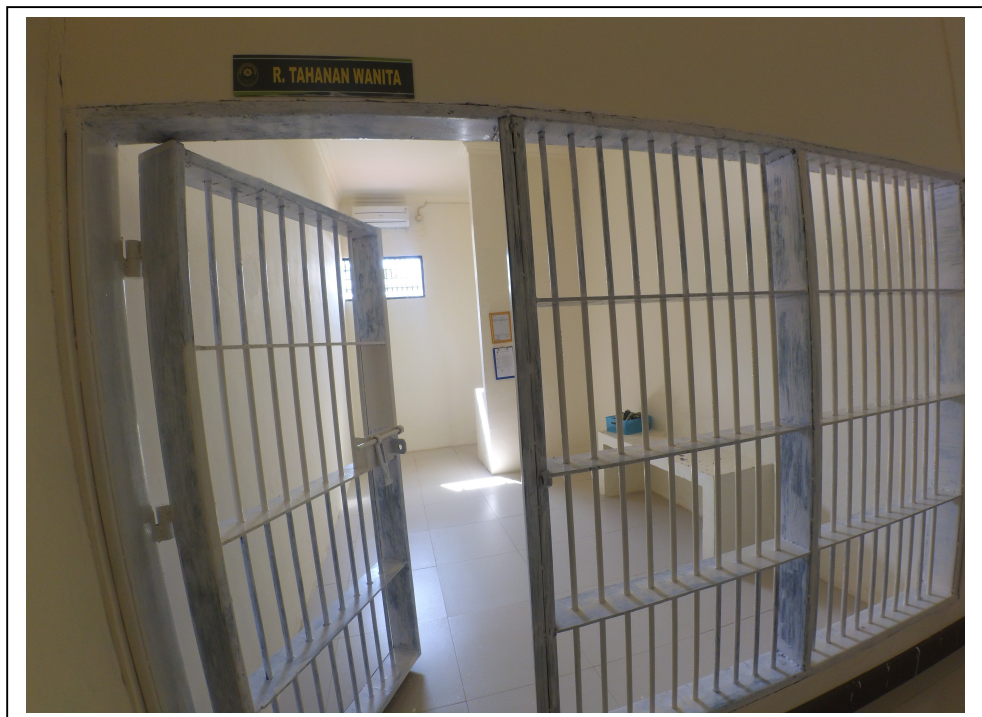
(foto lobi depan ruang sidang pengadilan negeri kotabaru)



(foto ruang sidang cakra, candra dan anak sari pengadilan negeri kotabaru)



(foto ruang tahanan lelaki)



(foto ruang tahanan wanita)



(foto tempat parkir mobil karyawan)



(foto tempat parkir motor karyawan)

C. Pengelolaan Teknologi Informasi

- Implementasi e-court di Lingkungan Pengadilan Negeri Kotabaru

Implementasi e-court di Pengadilan Negeri Kotabaru sudah berjalan dengan baik, Pengadilan Negeri Kotabaru juga sudah mengadakan beberapa sosialisasi baik internal maupun eksternal antara lain pada tanggal 27 Nopember 2018 Jam 11.00 WITA bertempat di Gedung Paris Barantai Kotabaru, Pengadilan Negeri Kotabaru Kelas II bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Kotabaru mengadakan Sosialisasi E-Court dan Gugatan Sederhana yang di hadiri Para Pejabat Eselon II, Eselon III, Camat, Lurah dan Kepala Desa di seluruh Kabupaten Kotabaru dan Pada hari Selasa Tanggal 27 Nopember 2018 Jam 14.00 WITA bertempat di Mom's Café & Resto, Pengadilan Negeri Kotabaru Kelas II bekerjasama dengan Bank BRI Cabang Kotabaru mengadakan Sosialisasi E-Court yang di hadiri oleh Bagian Hukum Pemda Kotabaru, Jaksa Pengacara Negara dan Para Advokat yang ber Acara di Kabupaten Kotabaru.



(foto sosialisasi e-court di gedung paris barantai)

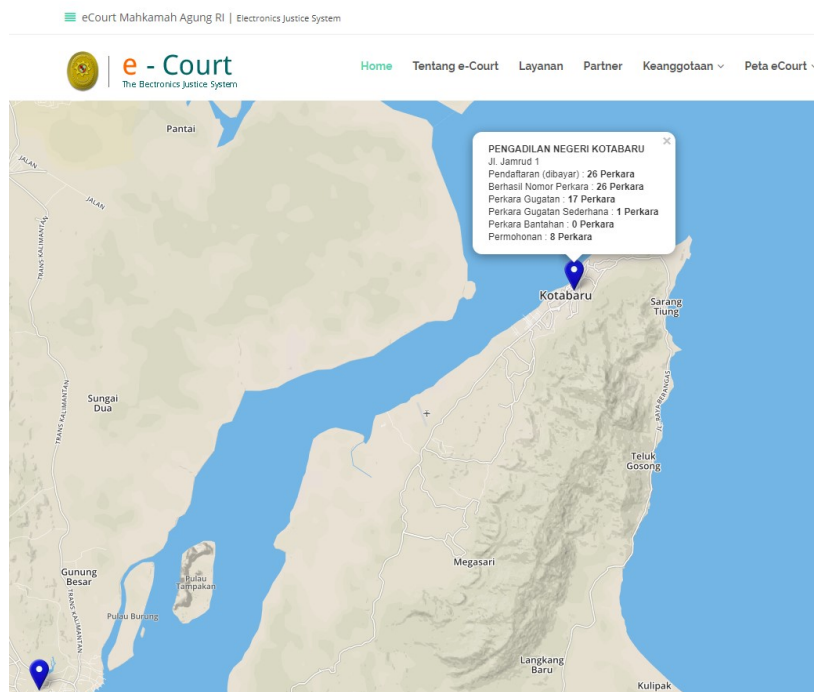


(foto sosialisasi e-court di mom's and café)

Sejak tanggal 22 Nopember Tahun 2018 sudah ada perkara masuk di Pengadilan Negeri Kotabaru yang melalui e-court dan Jumlah perkara Perdata yang melalui e-court di Pengadilan Negeri Kotabaru selama tahun 2018 ada 5 Perkara dan di tahun 2019 ada 11 Perkara, Gugatan sederhana 1 perkara dan permohonan ada 7 perkara.

12	PN KTB-1220183DB 11 Desember 2018	Sudah Dibayar (Melakukan konfirmasi Pembayaran)	Perkara Terdaftar - Putusan Tanggal Putusan : 24 Januari 2019	Rp. 2.216.000	21/Pdt.G/2018/PN Ktb 12 Desember 2018
13	PN KTB-122018BB3 11 Desember 2018	Sudah Dibayar (Konfirmasi Otomatis)	Perkara Terdaftar - Putusan Tanggal Putusan : 8 Agustus 2019	Rp. 3.126.000	23/Pdt.G/2018/PN Ktb 12 Desember 2018
14	PN KTB-122018VR4 11 Desember 2018	Sudah Dibayar (Konfirmasi Otomatis)	Perkara Terdaftar - Putusan Tanggal Putusan : 9 Mei 2019	Rp. 2.841.000	22/Pdt.G/2018/PN Ktb 12 Desember 2018
15	PN KTB-112018002 22 November 2018	Sudah Dibayar (Melakukan konfirmasi Pembayaran)	Perkara Terdaftar - Putusan Tanggal Putusan : 11 April 2019	Rp. 401.000	19/Pdt.G/2018/PN Ktb 23 November 2018
16	PN KTB-112018JE 22 November 2018	Sudah Dibayar (Melakukan konfirmasi Pembayaran)	Perkara Terdaftar - Putusan Tanggal Putusan : 24 Januari 2019	Rp. 3.711.000	20/Pdt.G/2018/PN Ktb 26 November 2018

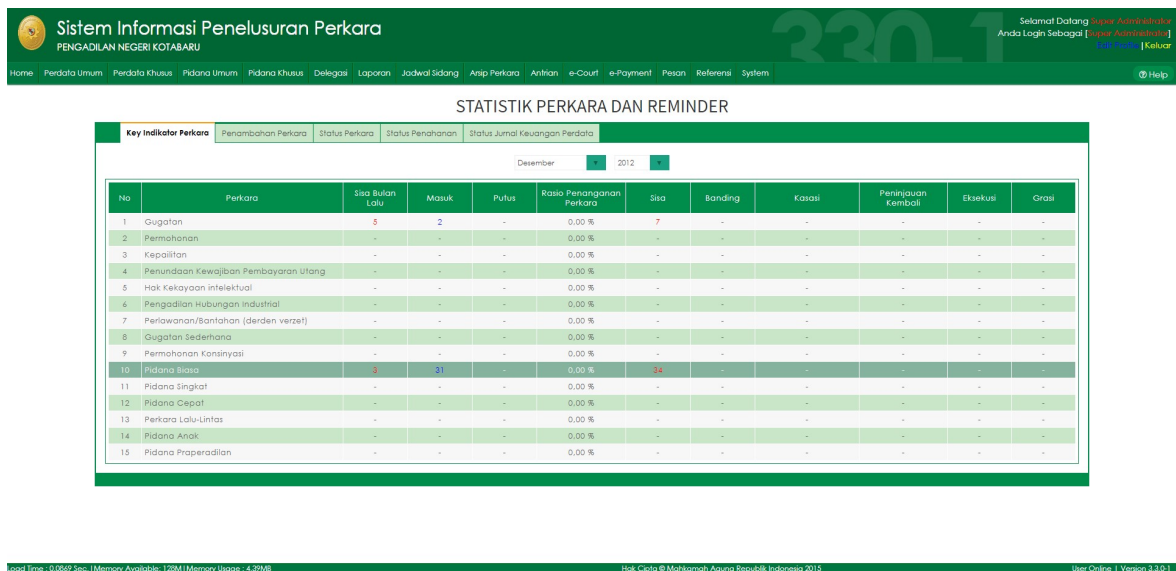
(screenshot e-court tahun 2018)



(screenshot peta e-court pertanggal 7 januari 2020)

- Implementasi SIPP di Lingkungan Pengadilan Negeri Kotabaru

Implementasi SIPP di Pengadilan Negeri Kotabaru sudah berjalan dari pertengahan tahun 2012. Setiap ada pembaharuan aplikasi di SIPP selalu diadakan sosialisasi internal di Pengadilan Negeri Kotabaru. Pengadilan Negeri Kotabaru juga mendapatkan Penghargaan dari Pengadilan Tinggi Banjarmasin sebagai Pengadilan Negeri Terbaik ke II se Kalimantan Selatan Tahun 2019 atas Mengimplementasi SIPP Baik dan Konsisten.



(screenshot sipp tahun 2012)



(foto penghargaan SIPP terbaik)

BAB V

Peningkatan Pelayanan Publik

- Akreditasi Penjamin Mutu

Pencanangan Zona Integritas di Pengadilan Negeri Kotabaru dilaksanakan pada Kamis, 28 Februari 2019 Jam 10.30 WITA Pengadilan Negeri Kotabaru mengadakan acara Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Acara ini di Hadiri oleh Perwakilan dari Bupati Kab. Kotabaru, Perwakilan dari Ketua DPRD Kab. Kotabaru, Kepala Kejaksaan Negeri Kotabaru, Perwakilan dari Kepala Kepolisian Resort Kab. Kotabaru, Perwakilan dari Komandan Komando Distrik Militer Kab. Kotabaru, Ketua Pengadilan Agama Kab. Kotabaru, Perwakilan dari Lembaga Permasyarakatan Kab. Kotabaru, Tokoh Agama Kab. Kotabaru dan Tokoh Masyarakat Kab. Kotabaru.



Penerapan Zona Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) juga di terapkan secara nyata di Pengadilan Negeri Kotabaru dimana setiap menerima tamu hanya melalui Ruang Tamu Terbuka yang ada di lantai 1 (satu) dekat dengan PTSP dan ada pembatasan zona pemisah ke Ruangan Kerja yang semua nya di Lantai II (dua) dimana untuk memasuki area tersebut hanya bisa di akses dengan finger print.



(foto ruang tamu terbuka)



(foto akses ke lantai 2 yang dilengkapi fingerprint)

- **Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)**

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagai garda depan untuk pelayanan di Pengadilan Negeri Kotabaru yang di lengkapi dengan Mesin Antrian dan selalu siap untuk melayani masyarakat yang berurusan di Pengadilan Negeri Kotabaru. Adapun segala pelayanan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Kotabaru tertuang dalam Surat Keputusan di bawah ini :



(foto pstp dan mesin antrian ptsp)



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KOTABARU
NOMOR : W15-U5/ 736 /KP.10.08/7/2019**

**TENTANG
PENUNJUKAN ATASAN, PEJABAT PENGELOLA, PENANGGUNG JAWAB
DAN PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PADA PENGADILAN NEGERI KOTABARU KELAS II**

KETUA PENGADILAN NEGERI KOTABARU

- Menimbang :
- a. Bahwa tujuan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan keterbukaan informasi sesuai yang diamanatkan Ketua Mahkamah Agung R.I. meningkatkan kemudahan akses pelayanan dan mempercepat waktu pelayanan;
 - b. Bahwa lingkup penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu meliputi pelayanan informasi perkara, informasi publik, administrasi perkara, pengesahan dokumen dan administrasi persuratan;
 - c. Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan, maka dipandang perlu untuk menunjuk petugas pelayanan terpadu satu pintu;
 - d. Bahwa pegawai yang namanya tersebut dibawah ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugasnya sebagai Petugas pelayanan terpadu satu pintu pada Pengadilan Negeri Kotabaru.

- Mengingat :
1. Undang – undang No. 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi;
 2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;
 3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI No. 144/KMA/SK/VII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan;
 5. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI No. 076/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Peradilan;
 6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tanggal 26 Februari 2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KOTABARU TENTANG
PENUNJUKAN ATASAN, PEJABAT PENGELOLA, PENANGGUNG
JAWAB DAN PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PADA
PENGADILAN NEGERI KOTABARU**
- Pertama :
- Menunjuk Hakim dan Pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Atasan, Pejabat Pengelola, Penanggungjawab dan Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pengadilan Negeri Kotabaru.

- Kedua : Segera melaksanakan keputusan ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil kerjanya kepada atasannya dan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru;
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : Kotabaru

Pada tanggal : 10 Juli 2019

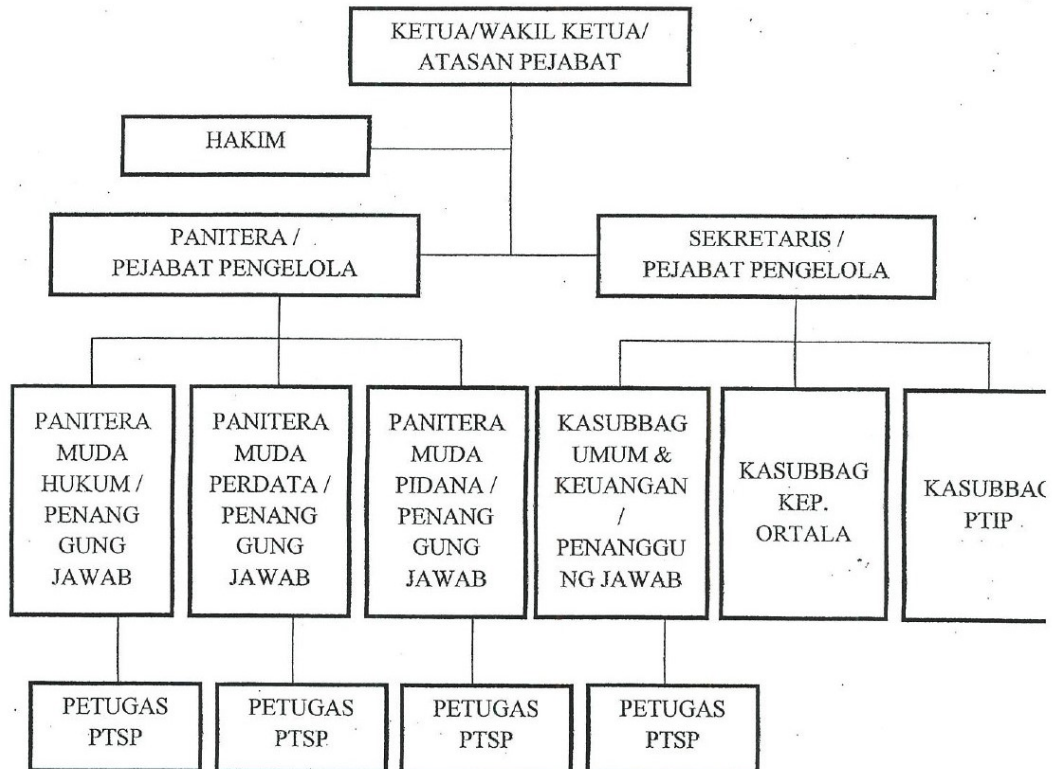
 **KETUA PENGADILAN NEGERI KOTABARU**

KUKUH KURNIAWAN

LAMPIRAN I SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI KOTABARU
NOMOR : W15-U5/736/KP.10.08/7/2019
TANGGAL 10 JULI 2019

TENTANG
PENUNJUKAN ATASAN, PEJABAT PENGELOLA, PENANGGUNG JAWAB
DAN PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PADA PENGADILAN NEGERI KOTABARU KELAS II

STRUKTUR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PENGADILAN NEGERI KOTABARU KELAS II



KETUA PENGADILAN NEGERI KOTABARU



KUKUH KURNIAWAN

LAMPIRAN II SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI KOTABARU
NOMOR : W15-U5/ ~~776~~ /KP.10.08/7/2019
TANGGAL 10 JULI 2019

TENTANG
PENUNJUKAN ATASAN, PEJABAT PENGELOLA, PENANGGUNG JAWAB
DAN PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PADA PENGADILAN NEGERI KOTABARU KELAS II

Atasan Pejabat Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pengadilan Negeri Kotabaru Kelas II adalah :

No.	Jabatan
1.	Ketua
2.	Wakil Ketua
3.	Para Hakim

Pejabat Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pengadilan Negeri Kotabaru Kelas II adalah :

No.	Jabatan
1.	Panitera
2.	Sekretaris

Penanggungjawab Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pengadilan Negeri Kotabaru Kelas II adalah :

No.	Jabatan
1.	Panitera Muda Perdata
2.	Panitera Muda Pidana
3.	Panitera Muda Hukum
4.	Kasub. Bag. Umum dan Keuangan

Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pengadilan Negeri Kotabaru Kelas II :

No.	Nama	PTSP pada bagian
1.	Seno Pribandono, S.E.	Kepaniteraan Perdata/ Kasir
2.	Dwi Kartika Puspasari	Kepaniteraan Perdata
3.	Supriyanto	Kepaniteraan Pidana
4.	Dewi Sartika, S.H.	Kepaniteraan Pidana
5.	Nor Jahriah	Kepaniteraan Hukum / Meja Pengaduan
6.	Rendra Herdiannanda, S.E.	Kepaniteraan Hukum / Help Desk
7.	Hadi Utomo, S.E.	Sub Bagian Umum dan Keuangan
8.	Rina Mariyana, S.Pd.	Sub Bagian Umum dan Keuangan


KETUA PENGADILAN NEGERI KOTABARU

KUKUH KURNIAWAN

LAMPIRAN III SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI KOTABARU
NOMOR : W15-US/ ~~736~~ /KP.10.08/7/2019
TANGGAL 10 JULI 2019

TENTANG
PENUNJUKAN ATASAN, PEJABAT PENGELOLA, PENANGGUNG JAWAB
DAN PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PADA PENGADILAN NEGERI KOTABARU KELAS II

Tugas Tanggung Jawab Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) :

I. Tugas, Tanggung Jawab, dan Kewenangan Atasan Pejabat Pengelola PTSP :

1. Menetapkan pelayan PTSP yang melengkapi Panmud – Panmud yang ada pada Kepaniteraan dan Bagian/Sub Bagian Umum dan Keuangan pada Kesekretariatan Pengadilan.
2. Mengangkat Pejabat Pengelola, Pertanggung Jawab, dan Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
3. Mensosialisasikan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) kepada seluruh aparat pengadilan.
4. Memberikan pengarahan KEPADA Pejabat Pengelola, Penanggung Jawab, dan Petugas Pelayanan Satu Pintu (PTSP).
5. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Pelayanan Satu Pintu Terpadu (PTSP).

II. Tugas, Tanggung Jawab, dan Kewenangan Pejabat Pengelola (PTSP) :

1. Membuat meja Pelayanan terpadu, Menyediakan sarana / prasarana sesuai kebutuhan sejumlah Panmud yang ada pada Kepaniteraan dan Bagian/Sub Umum dan Keuangan pada Kesekretariatan pengadilan.
2. Menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) secara efektif, efisien dan ekonomis.
3. Berkoordinasi dengan Pimpinan Pengadilan, Pejabat Teknis Dan Non Teknis agar pengelolaan Pelayanan Terpadu satu Pintu (PTSP) dapat berjalan dengan baik.
4. Pejabat Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bertanggung jawab kepada atasan Pejabat Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

III. Tugas, Tanggung Jawab, dan Kewenangan Penanggung jawab (PTSP) :

1. Membantu Pejabat Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dalam mengelola pelayanan pengadilan yang dilaksanakan oleh petugas PTSP.
2. Penanggung jawab Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap petugas maupun pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
3. Membimbing dan membina dan mengevaluasi terhadap petugas pelaksana serta Pelayan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

IV. Tugas dan Tanggung Jawab Dari Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu

A. Petugas Pelayanan Kepaniteraan Pidana :

1. Penerimaan pelimpahan berkas perkara pidana biasa, singkat, cepat dan ringan/lahu lintas dari Penuntut Umum/Penyidik
2. Pendaftaran permohonan praperadilan
3. Penerimaan permohonan perlawanan, banding, kasasi dan peninjauan kembali
4. Penerimaan memori/kontra memori perlawanan, banding, kasasi dan peninjauan kembali
5. Penerimaan permohonan pencabutan perlawanan, banding, kasasi dan peninjauan kembali
6. Penerimaan permohonan izin/persetujuan pengeledahan
7. Penerimaan permohonan izin/persetujuan penyitaan
8. Penerimaan permohonan izin/persetujuan pemusnahan barang bukti dan atau pelelangan barang bukti
9. Penerimaan permohonan perpanjangan penahanan
10. Penerimaan permohonan pembantaran
11. Penerimaan permohonan izin besuk
12. Penerimaan permohonan penetapan diversi dari penyidik dan penuntut umum
13. Layanan – layanan lain yang berhubungan dengan proses dan informasi penyelesaian perkara pidana.

B. Petugas Pelayanan Kepaniteraan Perdata :

1. Pendaftaran perkara gugatan perdata
2. Pendaftaran perkara gugatan sederhana
3. Pendaftaran verset atas putusan verstek
4. Pendaftaran perkara perlawanan/bantahan
5. Pendaftaran perkara permohonan
6. Pendaftaran permohonan banding, kasasi dan peninjauan kembali
7. Penerimaan memori/kontra memori banding, kasasi dan peninjauan kembali
8. Penerimaan permohonan sumpah atas ditemukannya bukti baru dalam permohonan peninjauan kembali
9. Permohonan dan pengembalian sisa panjar biaya perkara
10. Permohonan dan pengambilan turunan putusan
11. Pendaftaran permohonan esksekusi
12. Pendaftaran permohonan konsinyasi
13. Permohonan pengambilan hasil eksekusi dan uang konsinyasi
14. Permohonan pencabutan gugatan, permohonan banding, kasasi, peninjauan kembali dan eksekusi dan konsinyasi
15. Permohonan pendaftaran putusan arbitrase
16. Layanan – layanan lain yang berhubungan dengan proses dan informasi penyelesaian perkara perdata.

C. Petugas Pelayanan Kepaniteraan Hukum :

1. Permohonan Pendaftaran Akta pendirian CV
2. Permohonan Pendaftaran Waarmaking surat pernyataan waris
3. Permohonan pendaftaran penolakan waris
4. Permohonan surat keterangan tidak tersangkut perkara pidana dan perdata
5. Permohonan melaksanakan penelitian dan riset
6. Permohonan keterangan data perkara dan turunan putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap
7. Permohonan pendaftaran surat kuasa
8. Permohonan pendaftaran legalisasi akta kelahiran
9. Permohonan legalisasi surat
10. Permohonan pendaftaran utang tak tertagih
11. Layanan pengaduan / SIWAS – MART
12. Layanan – layanan lain yang berhubungan dengan pelayanan jasa hukum lainnya.

D. Petugas Pelayanan Bagian Umum dan Keuangan :

1. Penerimaan surat masuk
2. Penerimaan berkas perkara banding, kasasi, peninjauan kembali dan grasi.


KETUA PENGADILAN NEGERI KOTABARU

HUKUH KURNIAWAN

LAMPIRAN IV SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI KOTABARU
NOMOR : W15-U5/ /KP.10.08/7/2019
TANGGAL 10 JULI 2019

TENTANG
PENUNJUKAN ATASAN, PEJABAT PENGELOLA, PENANGGUNG JAWAB
DAN PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PADA PENGADILAN NEGERI KOTABARU KELAS II

Tugas, Tanggung Jawab Dan Kewenangan Hakim Dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

1. Membantu ketua atau wakil selaku atasan pejabat pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu jika berhalangan tetap/hadir melakukan pengawasan dan pembinaan kepada pejabat pengelola pelayanan terpadu satu pintu.
2. Membantu pengawasan dan pembinaan kepada petugas layanan terpadu satu pintu.
3. Membantu pengawasan dan pembinaan selaku pengawas bidang.


KETUA PENGADILAN NEGERI KOTABARU

KEKUH KURNIAWAN

LAMPIRAN V SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI KOTABARU
NOMOR : W15-U5/ /KP.10.08/7/2019
TANGGAL 10 JULI 2019

TENTANG
PENUNJUKAN ATASAN, PEJABAT PENGELOLA, PENANGGUNG JAWAB
DAN PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PADA PENGADILAN NEGERI KOTABARU KELAS II

Jadwal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Pengadilan Negeri Kotabaru

SENIN s/d KAMIS	:	08.00 – 16.30 WITA
ISTIRAHAT	:	12.00 – 13.00 WITA
JUMAT	:	07.30 – 16.30 WITA
ISTIRAHAT	:	11.30 – 13.00 WITA

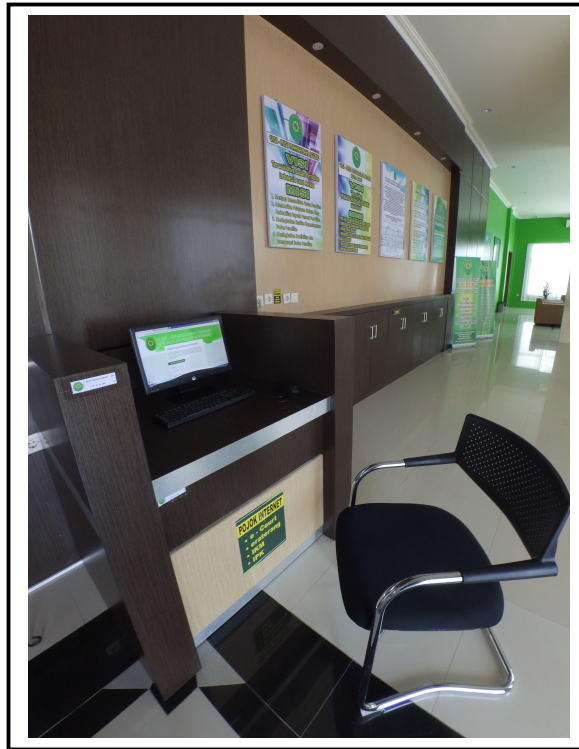


KETUA PENGADILAN NEGERI KOTABARU

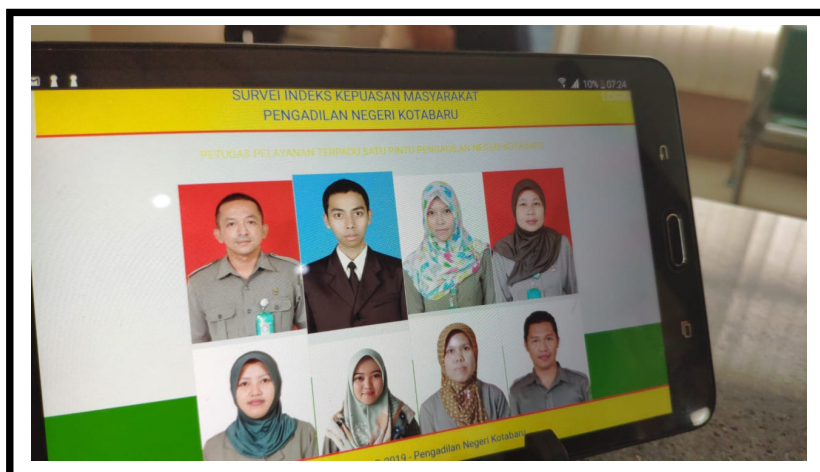
KUKUH KURNIAWAN

- Inovasi Pelayanan Publik

Untuk Inovasi Pelayanan Publik Pengadilan Negeri Kotabaru mempunyai Pojok Internet dimana masyarakat bisa menggunakannya secara gratis Survei Indeks Kepuasan Masyarakat dan Survei Indeks Persepsi Korupsi juga secara Elektronik dan Loker penyimpanan barang bagi yang ingin menitipkan barangnya yang tidak bisa di bawa ke ruang sidang dimana bisa dilihat dari gambar yang kami tampilkan di bawah ini :



(foto pojok internet)



(foto indeks kepuasan masyarakat)



INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PENGADILAN NEGERI KOTABARU

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

KUISIONER

Mohon diisi sesuai dengan keadaan bapak/ibu yang sebenarnya, karena hal ini tidak mempengaruhi kondisi maupun pelayanan terhadap Bp/Ibu, dan betul-betul untuk kepentingan ilmiah.

Pertanyaan

Please select all that apply

	Sangat Baik	Baik	Cukup Baik	Tidak Baik
Menurut Bpk/Ibu/Sdr, kelengkapan yang harus dipenuhi dalam pengurusan pelayanan di Pengadilan Negeri Kotabaru?	☐	☐	☐	☐
Menurut Bpk/Ibu/Sdr, bagaimana tata cara pelayanan di Pengadilan Negeri Kotabaru?	☐	☐	☐	☐
Menurut Bpk/Ibu/Sdr, waktu penyelesaian suatu proses pelayanan di Pengadilan Negeri Kotabaru?	☐	☐	☐	☐
Menurut Bpk/Ibu/Sdr, bagaimana biaya yang dikenakan dalam memperoleh pelayanan di Pengadilan Negeri Kotabaru?	☐	☐	☐	☐
Menurut Bpk/Ibu/Sdr, bagaimana hasil pelayanan yang diberikan di Pengadilan Negeri Kotabaru?	☐	☐	☐	☐
Menurut Bpk/Ibu/Sdr, bagaimana pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman petugas?	☐	☐	☐	☐
Menurut Bpk/Ibu/Sdr, bagaimana sikap petugas dalam memberikan pelayanan?	☐	☐	☐	☐
Menurut Bpk/Ibu/Sdr, bagaimana kesigapasan dan kewajiban dari para petugas dalam memberikan pelayanan?	☐	☐	☐	☐
Menurut Bpk/Ibu/Sdr, bagaimana penanganan pengaduan, saran dan masukan, serta tindak lanjutnya di Pengadilan Negeri Kotabaru?	☐	☐	☐	☐

Selanjutnya, mohon Bpk/Ibu/Sdr dapat memberikan SARAN-SARAN PERBAIKAN, agar Pengadilan Negeri Kotabaru bisa meningkatkan kualitas pelayanannya. SARAN-SARAN PERBAIKAN:

Your answer

BACK

SUBMIT

Never submit passwords through Google Forms.

This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy

Google Forms



INDEKS PERSEPSI KORUPSI PENGADILAN NEGERI KOTABARU

Kuisisioner Persepsi Korupsi

KUISIONER :

Pilih jawaban yang tersedia sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu/Saudara(i)

Your answer

Bagaimana pendapat Bapak/Ibu/Saudara(i)

Please select all that apply

	Selalu	Sering	Jarang	Tidak Ada
Apakah pelayanan oleh petugas sesuai prosedur dan ketentuan dan tidak dipersuik untuk maksud tertentu (Manipulasi peraturan)	☐	☐	☐	☐
Apakah dalam memperoleh layanan Pengadilan secara cepat dan Mudah selalu diberikan tanpa ada perawaran dari petugas untuk meminta imbalan tertentu? (Penyalahgunaan Jabatan)	☐	☐	☐	☐
Pernahkah dihubungi oleh seseorang (karyawan Pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat/berkas perkara? (Menjual pengaruh)	☐	☐	☐	☐
Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun Petugas layanan? (Hadiah)	☐	☐	☐	☐
Apakah selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan? (biaya tambahan)	☐	☐	☐	☐
Memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima (meskipun tidak diminta)? (Hadiah)	☐	☐	☐	☐
Menerima budi Transaksi keuangan/pembayaran yang sah setelah proses pembayaran dilakukan? (Transparansi Biaya)	☐	☐	☐	☐
Pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di pengadilan? (percaloan)	☐	☐	☐	☐
Pernah melihat dan/atau mendengar masih terjadi praktek KKN di pengadilan? (perbuatan curang)	☐	☐	☐	☐
Pernah mengurus perkara melalui Hakim/Panitera/Staff pengadilan di luar persidangan? (Transaksi Rahasia)	☐	☐	☐	☐

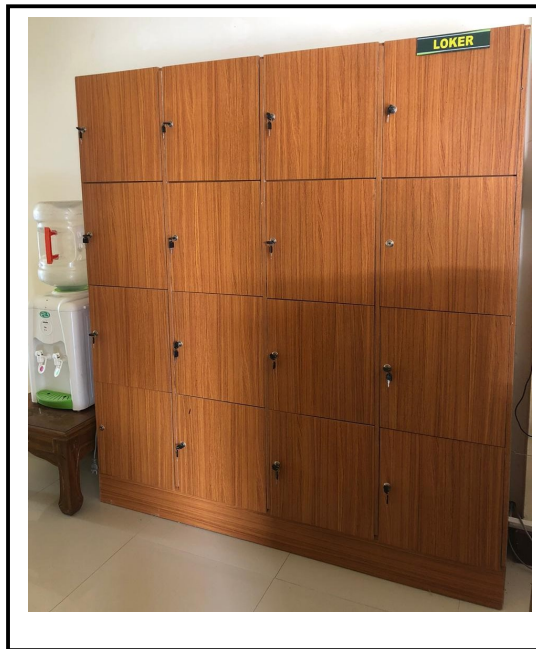
BACK

SUBMIT

Never submit passwords through Google Forms.

This content is neither created nor endorsed by Google. [Report Abuse](#) [Terms of Service](#) [Privacy Policy](#)

Google Forms



(foto loker penyimpanan)

BAB VI

PENGAWASAN

A. Internal

Dalam melaksanakan pengawasan melekat, wewenang dan tanggung jawab pengawasan berada pada Pimpinan Pengadilan, Seluruh Pejabat Kepaniteraan, dan Seluruh Pejabat Struktural di lingkungan Pengadilan Negeri Kotabaru Kelas II. Obyek pengawasan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kotabaru Kelas II adalah meliputi pengawasan intern Pengadilan Negeri. Sedangkan ruang lingkup pengawasan rutin/ reguler meliputi :

1. Manajemen peradilan yang terdiri atas program kerja, pelaksanaan tugas, Pengawasan dan pembinaan dan evaluasi kegiatan.
2. Administrasi peradilan yang terdiri dari administrasi perkara, administrasi persidangan, pelaksanaan eksekusi serta administrasi umum.
3. Mutu pelayanan publik.
4. Kinerja Pengadilan.

Pengawasan rutin/ reguler dilaksanakan dalam bentuk pemeriksaan yaitu dengan bentuk pengamatan dari dekat, dengan cara melakukan perbandingan antara sesuatu yang telah atau akan dilaksanakan dengan sesuatu yang seharusnya dilaksanakan menurut ketentuan peraturan yang berlaku. Pengawasan reguler ini dilakukan setiap bulan, sedangkan pengawasan khusus dilaksanakan berdasarkan laporan dari masyarakat dan juga hasil dari temuan dalam Laporan Bulanan.

Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Tim Pengawas Bidang yang dibentuk dari Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru Kelas II yang bertugas mengawasi :

- Bidang Pidana
- Bidang Perdata
- Bidang Hukum
- Bidang Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
- Bidang Umum dan Keuangan
- Bidang Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana

Mahkamah Agung RI didalam menjalankan tugas dan fungsi yaitu mempunyai tugas pengawasan kedalam pada 4 (empat) lingkungan badan peradilan dibawahnya. Secara substansial ruang lingkup pengawasan yang harus dilaksanakan oleh Mahkamah Agung meliputi teknis peradilan dan organisasi , administrasi, dan financial di lingkungan Mahkamah Agung sendiri dan pada semua Badan Peradilan yang berada di bawah kekuasaannya.

Karena sangat luas dan besarnya tanggung jawab pengawasan oleh Mahkamah Agung, maka pendelegasian wewenang pengawasan telah dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tingkat Banding selaku voorpost (kawal depan) Mahkamah Agung.

Berhubung hal tersebut diatas, Pengadilan Tinggi Banjarmasin telah menugaskan seorang Hakim Tinggi Pengawas Daerah dibantu unsur – unsur Kepaniteraan dan Kesekretariatan untuk melakukan pengawasan internal kepada Pengadilan Negeri Kotabaru, dan telah dilakukan 2 (dua) kali dalam satu tahun. Dan atau jika dipandang perlu apabila diketemukannya dan atau perlu pembinaan dengan segera, maka atas kebijakan Ketua Pengadilan Tinggi, personil yang bersangkutan untuk segera datang menghadap kepada Pengadilan Tinggi Banjarmasin di Banjarbaru.

B. Evaluasi

Dengan dasar hasil pengawasan internal tersebut apabila terdapat beberapa kelemahan yang harus segera dibenahi, kami Ketua Pengadilan Negeri dengan dibantu seluruh Hakim melakukan Evaluasi dan pengawasan secara menyeluruh terhadap Panitera, Sekretaris dan unsur – unsur dibawahnya, yang nantinya sebagai temuan untuk disampaikan secara transparan pada rapat dinas bulanan, yang selanjutnya diambil kebijakan yang terbaik.

Dalam upaya melaksanakan keterbukaan informasi, Pengadilan Negeri Kotabaru Kelas II telah membuka aplikasi pengaduan secara online sesuai petunjuk Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dengan alamat : <https://siwas.mahkamahagung.go.id/>. Dimana dengan adanya aplikasi pengaduan secara online tersebut maka setiap orang yang ingin melaporkan dan mengadukan sesuatu cukup mengakses situs tersebut.



(Tampilan <https://siwas.mahkamahagung.go.id/>)

BAB VII PENUTUP

A. Kesimpulan

Out line pelaporan tahunan, merupakan tolok ukur suatu kinerja pada masing – masing satuan kerja dalam hal ini Pengadilan Negeri Kotabaru Kelas II. Dimana masih banyak kekurangan dan hambatan yang dengan segera harus dibenahi, hal ini disebabkan kurangnya personil / pegawai yang diharapkan sebagai staf apabila dihubungkan dengan volume perkara pada Pengadilan Negeri Kotabaru Kelas II, demikian pula jumlah Hakim tidak sebanding dengan jumlah Panitera dalam penyelesaian perkara / minutasi.

B. Saran-saran

Dengan pertimbangan masih diperlukannya pembenahan dengan segera, diharapkan kepada Mahkamah Agung RI. untuk segera merekomendasikan, tentang :

1. Penambahan jumlah Hakim dan Panitera Pengganti
2. Penambahan Pegawai, agar tidak terjadi perangkapan tugas (sampai dengan sekarang tugas – tugas staf kepaniteraan dan kesekretariatan dirangkap oleh pejabat fungsional dan pejabat strukturan serta dibantu oleh tenaga honorer / kontrak dengan jumlah 14 (empat belas) orang.

Kotabaru, 08 Januari 2020
Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Kelas II



KUKUH KURNIAWAN, SH.MH.
NIP. 19780516 200212 1 005